

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan *Content of Policy* (isi Kebijakan) dan Konteks Implementasi Kebijakan (*Context of Implementation*) factor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tidak berjalan optimal diantaranya adalah karena adanya factor derajat perubahan yang di inginkan. Implementasinya adanya ego sectoral dan perbedaan metode dalam pengumpulan data penduduk di Badan Pusat Statistik dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menyebabkan perbedaan data penduduk, sementara derajat perubahan yang diharapkan adalah satu data kependudukan tidak lagi adanya perbedaan data penduduk.
2. Implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sudah berjalan namun belum berjalan secara optimal butuh proses panjang. Masih ada perbedaan data penduduk dari sebelum dan sesudah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi perbedaan data kependudukan.

V.2 Saran

Untuk keberlanjutan penyelenggaraan integrasi data kependudukan, khususnya dalam mencapai target jangka menengah dan jangka Panjang, untuk mewujudkan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, perlu direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

Menyarankan kepada kepala Pemerintah dalam hal ini Presiden agar membuat Peraturan Presiden baru. Peraturan Presiden tentang satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang lebih detail, dengan petunjuk teknik lebih operasional (prinsip satu data kependudukan, penyelenggara satu data kependudukan, pendanaan, partisipasi lembaga negara dan badan hukum public). Peraturan Presiden sebagai payung hukum dimana Peraturan Presiden yang mengatur tatakelola satu data kependudukan yang belum ada atau masih dianggap kurang kuat dalam memayungi koodinasi pertukaran data kependudukan dan sebagainya, sehingga dalam implementasi kebijakan satu data kependudukan jelas dan kuat peraturannya, termasuk nanti bagaimana sistem berbagi pakainya itu juga belum ada. Harapannya adanya Peraturan Presiden tentang satu data kependudukan ini akan mengatur tentang satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukn Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dimana satu data kependudukan memuat kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data kependudukan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data Induk yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H., 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Jurnal. Ilmu Administrasi Publik.
- A. Murni Yusuf. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:
- Atmojo, S. Prajudi. 2006. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jilid II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bachrawi Sanusi. (2004). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, M. Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta.
- Deddy Mulyadi, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Jakarta, 2021
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Gulo W. 2004 *Metode Penelitian*, Jakarta. PT. Grasindo

- Handoyo, E. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Jakarta Pusat dalam Angka, 2021
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media
- Nasution, S. 2017. '*Variabel penelitian*', Raudhah.
- Nugroho Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-negara berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastusi, D. R. 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta Gave
- Rineka Cipta. Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, Sondang P. 1997. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta. PT. Toko Gunung Agung.
- Siagian, Sondang, 2005, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.) 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S
- Sita Dewi, Dwi Listyawati, Bertha elvy Napitupulu *Jurnal Sistem Informasi*. Universitas Surabaya Tahun 2018
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sutopo, HB. 2006. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2004, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

United Nations. 1998. *Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems: Computerization*. New York. Republik Indonesia. 2013.

Prakoso Bhairawa Putera^{1,5}, Lindung Parningotan Manik², Yan Rianto³, Ajeng Arum Sari⁴, & Rifki Sadikin², *How Indonesia uses Big Data “Indonesian One Data” for the Future of Policy Making* International Journal of Advanced Science and Technology Vol.29 No.5,(2020)

Jefirstson Richset Riwukore¹, Luis Marnisah², Fellyanus Habaora³, Tien Yustini⁴, *Implementation of One Indonesian Data by the Central Statistics Agency of East Nusa Tenggara Province*, Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol) ISSN2716-0807, Vol 1, No 2, 2021, 117-128

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 5475. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019

Undang-Undang Statistik Nomor 16 tahun 1997

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/>

www.bps.go.id